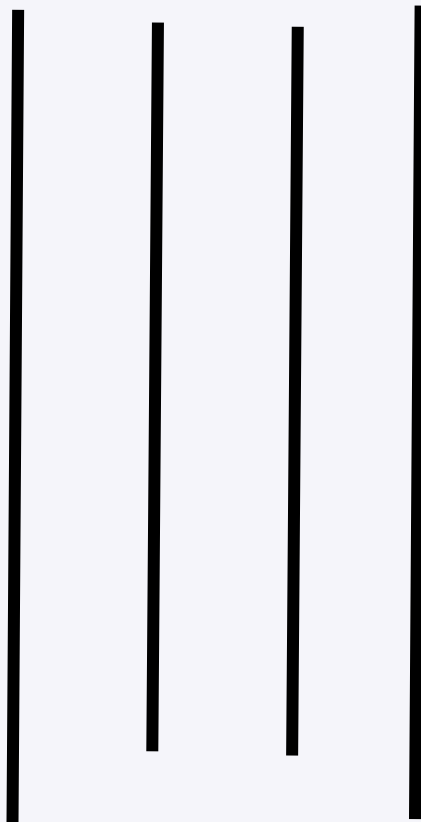


**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA PERUBAHAN)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERKEBUNAN**

**JL. Yusuf Singedikane no 1 Telanaipura - Jambi 36122
Telp. (0741) 62596 Fax. (0741) 60561**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung visi dan misi melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Provinsi tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) tahun 2024 sangat penting disusun sebagai acuan penilaian pencapaian kinerja dari sasaran tahunan yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan perkebunan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026 akan dicapai melalui beberapa Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Renja Perubahan tahun 2024 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan didalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024.

Penyusunan Renja Perubahan ini tentunya masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, semoga Renja Perubahan 2024 ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jambi, Oktober 2024
Pit. KEPALA DINAS,

Rakmat Dharmawan, S.Pt
Pembina
NIP. 19710831 199803 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I.Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB.II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB.III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB.IV. PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Capaian Renstra s/d Tahun 2023	7
2. Tabel.2. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan s/d Tahun 2023	11
3. Tabel.3. Review terhadap Rancangan awal RKPD dengan Renja Dan Anggaran Tahun 2023	17
4. Tabel.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	29
5. Tabel.5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Tahun 2025 Dinas Perkebunan	34
6. Tabel.6. Rumusan Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan Tahun 2024	44

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada rancangan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja (Ran-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran terhadap evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah tahun lalu dan analisis terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat yang akan dikaji terkait dengan kebijakan nasional.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan RPJMD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bab.II. Tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana disebutkan pada pasal 84 bahwa Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan yang di mulai dari penyusunan Ranwal-Renja PD, dilakukan Verifikasi oleh Bappeda, dilakukan Forum lintas Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam substansi penyusunan Ranwal-RKPD Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan RPJMP, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menselaraskan kembali usulan kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini sehingga lebih menjamin kesinambungan dan keberlangsungan program-program pembangunan, Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan teknis operasional Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia untuk Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024 ini masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan,
- 1.4 Sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu

- 1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun lalu (2021-2023) juga harus dilakukan evaluasi yang terkait dengan 3 (tiga) hal pokok, yaitu ; kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Selanjutnya Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Capaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2023 (Form T-C.29 Permendagri 86/2017).

No	Usuran/Bidang Usuran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.2021						Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			
							Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Target Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja Program	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8=7/6		-9		-10=(5+7+9)		-11=10/4	
1.	NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												21.576.919					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	60,00	21.656.801	60,08 (8)	16.516.063	65,00 (8)	18.691.754	67,74 (8)	17.987.060	105	96,23	67,00 (8)	21.576.919	194,8	56.080.042	3,25	2,59
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9 Dokumen	801.351	9 Dokumen	463.050	9 Dok	575.365	9 Dok	357.351	100	62,11	9 Dok	616.689	27	1.437.090	3,00	1,79
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Statistik Perkebunan	6 Dokumen	425.351	6 Dokumen	231.525	6 Dok	227.500	6 Dok	179.486	100	78,89	6 Dok	224.357	6	635.368	100,0	1,49
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Buku RKA-Dibun	20 Buku	-	20 Buku	-	20 Buku	15.000	0	-	-	0	20 Buku	15.000	-	15.000		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku RKAP-Dibun	20 Buku	-	20 Buku	-	20 Buku	20.000	0	-	-	0	20 Buku	20.000	-	20.000		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Buku DPA-Dibun	20 Buku	-	20 Buku	-	20 Buku	15.000	0	-	-	0	20 Buku	15.000	-	15.000		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Buku DPAP-Dibun	20 Buku	-	20 Buku	-	20 Buku	15.000	0	-	-	0	20 Buku	15.000	-	15.000		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Miltir Realisasi Kinerja SKPD	Laporan (LPPK, LKJ, LKPI, LPPD)	5 Laporan	-	5 Laporan	-	5 Laporan	150.000	0	-	-	0	5 Laporan	150.000	-	150.000		0,00
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan Evaluasi Renja, Renstra, SPIP, Monev Kegiatan.	3 Laporan	376.000	3 Laporan	231.525	3 Laporan	177.865	3 Laporan	177.865	100	100,00	3 Laporan	222.331	3	631.721	100	1,68

No	Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.2021						Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022				
							Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Target Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja Program		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10= (-5+7+9)		-11= 10/4		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Akuntansi dan Keuangan	5 Laporan	14.278.681	5 Laporan	13.719.061	5 Laporan	15.721.978.899	5 Lap	12.475.314		0,08	5 Laporan	16.508.077		42.702.452		2,99	
		Periode Penyelesaian gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	13.828.681	14 bulan	13.360.796	14 bulan	15.350.132.649	13,0	12.397.175		0,08	14 bulan	16.117.639		41.875.610		3,03	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi pengelolaan keuangan	48 Orang	300.000	48 Orang	287.270	48 Orang	267.470.750	12	29.571		0,01	50 orang	280.844		597.685		1,99
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penggalan laporan akuntansi dan keuangan yang disusun	3 Dokumen	150.000	3 Dokumen	70.995	3 Dokumen	104.375.500	3	48.568		0,05	3 Dokumen	109.594		229.157		1,53
												0,00							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset Barang Milik Daerah	3 Laporan	0	3 Laporan	0	3 Laporan	50.000.000	0	-		0,00	3 Laporan	183.800		183.800		0,00	
		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah kendaraan operasional Roda Empat yang diuruskan	0	0	0	0	-	0	-		0,00	14 unit	93.800		93.800		0,00	
			Jumlah gedung kantor yang diuruskan (Tebanapura)	0	0	0	0	-	0	-		0,00	4 unit	40.000		40.000		0,00	
		Pertanggungjawaban barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan aset barang milik daerah (BMD)	0	0	0	0	50.000.000	0	-		0,00	3 Dokumen	50.000		50.000		0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	3 Laporan	251.386	3 Laporan	156.750	3 Laporan	240.699	3 Lap	83.727		34,78	3 Laporan	624.450		864.927		3,44	
		Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	165 Stel	171.386	165 Stel	107.250	165 Stel	76.969	165	76.857		99,85	165 steel	98.000		282.107		1,65
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu	0	-	0	-	0	-	0	-		0,00	50 orang	3.600.000		3.600.000		0,00
		Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang dilatih	20 Orang	80.000	20 Orang	49.500	20 Orang	27.000	9	6.870		25,44	120 Orang	526.450		582.820		7,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	5 Laporan	1.068.227	5 Laporan	950.336	5 Laporan	474.046	7 Lap	383.371		80,87	7 Laporan	871.423		2.205.130		2,06	
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	204.866	6 Jenis	322.740	6 Jenis	17.430	6	17.430		100,00	6 Jenis	26.100		366.270		1,79
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis ATK	48 Jenis	182.000	48 Jenis	168.425	48 Jenis	136.730	47,9	100.549		73,54	48 Jenis	219.253		488.227		2,68
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis ART	24 Jenis	298.384	24 Jenis	183.211	24 Jenis	63.798	11,7	63.799		100,00	24 Jenis	83.033		330.043		1,11
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	3.900 eks	19.977	3.900 eks	10.960	3.900 eks	10.958	3.900	10.958		100,00	3.900 eks	21.120		43.038		2,15
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi	925 OK	363.000	925 OK	265.000	925 OK	245.130	725	190.635		77,77	950 OK	521.916		977.551		2,69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Jenis	2.638.256	3 Jenis	458.677	3 Jenis	687.226	5 Jenis	-		0,00	5 Jenis	1.412.637		1.871.314		0,71	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	3 Unit	1.672.188	0	-	3 Unit	-	0	-		0,00	25 Unit	980.000		980.000		0,59
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu	10 unit	554.971	10 unit	323.677	0	172.072	0	-		0,00	6 Jenis	180.607		504.284		0,91
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Software dan Hardware	30 Unit	411.097	10 unit	135.000	30 Unit	102.816	0	-		0,00	20 Unit	252.030		387.030		0,94
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat dan Jasa Komunikasi SDA, dan Listrik	4 Jenis	365.336	4 Jenis	345.870	4 Jenis	372.990	4	338.247		90,69	4 Jenis	507.155		1.191.272		3,26	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1155 surat	34.336	1155 surat	23.130	500 surat	39.348	498	39.348		100,00	500 surat	41.315		103.793		3,02
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening	3 Jenis	331.000	3 Jenis	322.740	3 Jenis	333.642	3	298.899		89,59	3 jenis	465.840		1.087.479		3,29
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	80 Unit	2.253.564	64 Unit	422.319	74 Unit	932.580	72	792.053		84,93	96 Unit	666.686		1.881.058		0,83	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang direhab dan dibayarkan pajaknya.	46 Unit	431.108	40 Unit	313.669	46 Unit	360.060	44	461.032		128,04	61 Unit	255.000		1.029.701		2,39
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	27 Unit	128.000	23 Unit	78.650	27 Unit	87.320	27	87.321		100,00	27 unit	91.686		257.657		2,01
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang direhab	7 Unit	1.694.456	1 Unit	30.000	7 Unit	485.200	1	243.700		50,23	8 unit	320.000		593.700		0,35

No	Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.2021						Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			
							Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Target Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10=(5+7+9)		-11=10/4	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.	10,0	1.094.567	10,0	694.992	15,0	24.309.818	14,50	5.673.971		23,34	17,0	16.604.000	41,50	22.972.963	4,15	20,99
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan	11 kab/kota	234.168	11 kab/kota	50.000	11 kab/kota	321.500	11	244.849		76,16	11 kab/kota	277.000		571.849		2,44
	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alisintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	11 Laporan	84.168	11 Laporan	50.000	11 Laporan	195.000	10	189.974		97,42	11 Laporan	150.000		389.974		4,63
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	2 dokumen	150.000	2 dokumen	-	2 dokumen	126.500	2	54.875		43,38	2 dokumen	127.000		181.875		1,21
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat	4 Komoditi	227.600	4 Komoditi	100.000	6 Komoditi	22.493.348	4 Komoditi	4.972.880		22,11	6 Komoditi	15.500.000		20.572.880		90,39
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	350 Sertifikat	75.000	350 Sertifikat	-	425 Sertifikat	350.000	0	-		0,00	425 Sertifikat	350.000		350.000		4,67
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 Laporan	152.600	4 Laporan	100.000	14 Laporan	22.143.348	4	4.972.880		22,46	16 Laporan	15.150.000		20.222.880		132,52
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola	1 Dok	632.799	1 Dok	544.992	4 Kab/Kota	825.799	4,0	228.121		27,62	4 Kab/Kota	827.000		1.600.113		2,53
	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang	0	-	0	0	1 VUB	156.630	0	-		0,00	1 VUB	157.000		157.000		0,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	1 Laporan	632.799	1 Laporan	544.992	4 Laporan	669.169	4	228.121		34,09	5 Laporan	670.000		1.443.113		2,28
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota	5,0	10.478.825	5,0	9.569.328	9,0	3.993.336	8,0			0,00	10,0	2.395.000	23,0	11.964.328	4,6	1,14
	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	4 Kegiatan	10.326.225	4 Kegiatan	9.469.328	4 Kegiatan	3.562.149				0,00	4 Kegiatan	2.395.000		11.864.328		1,15
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas Pertanian/perkebunan.	2 Dokumen	850.000	2 Dokumen	434.000	2 Dokumen	300.000	2	42.654		14,22	2 Dokumen	200.000		676.654		0,80
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	Jumlah pengendalian, pemanfaatan prasarana kawasan, dan komoditas pertanian. (Pengadaan	0	-	0	-	5 Unit	415.000	-	-		0,00	5 Unit	415.000		415.000		0,00
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas	Jumlah pengendalian, pemanfaatan prasarana kawasan, dan komoditas	12 Laporan	6.539.159	12 Laporan	6.375.328	5 Dokumen	2.185.961	-	-		0,00	5 Dokumen	1.150.000		7.525.328		1,15
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Laporan	2.700.000	1 Laporan	2.620.000	2 Dokumen	230.000	2	71.175		30,95	2 Dokumen	100.000		2.791.175		1,03
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	1 Laporan	237.066	1 Laporan	40.000	2 Dokumen	150.000	2	32.530		21,69	2 Dokumen	80.000		152.530		0,64

No	Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.2021						Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			
			Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Target Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja Program		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Kinerja Program	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10=(5+7+9)		-11= 10/4	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah UPTD yang dilakukan pembangunan/pemeliharaan laboratorium	1 Laporan	152.600	1 Laporan	100.000	1 Laporan	431.187	246.293	57,12	2 Unit	250.000		596.293		3,91		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	152.600	1 Laporan	100.000	1 Laporan	281.187	130.534	46,42	1 Laporan	200.000		430.534		2,82		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD pertanian serta Sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara, dan direhabilitasi.	0	-	0	-	1	150.000	115.759	77,17	1 unit	-		115.759		0,00		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas areal Pengendalian OPT perkebunan dan bencana pertanian	15,0	805.205	15,0	685.992	19,0	4.621.554	20,0	1.635.185	35,38	20,0	2.450.000	55,0	4.771.177	3,7	5,93	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	9 Kab/Kota	805.205	9 Kab/Kota	685.992	9 Kab/Kota	4.621.554	9	1.635.185	35,38	9 Kab/Kota	2.450.000		4.771.177		5,93	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	50 Ha	474.666	50 Ha	444.992	125 Ha	270.054	100	82.552	30,57	125 Ha	200.000		727.544		1,53	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani.	1 Laporan	159.539	1 Laporan	150.000	100 Ha	3.250.000	0	-	0,00	150 Ha	1.450.000		1.600.000		10,03	
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk)	1 Laporan	171.000	1 Laporan	91.000	100 Ha	651.500	100	1.552.633	238,32	100 Ha	500.000		2.143.633		12,54	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam bidang Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk BIOCF)	0	-	0	-	4 Laporan	450.000	0	-	0,00	4 Laporan	300.000		300.000		0,00	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan Perusahaan	60	567.462	60	100.000	100	350.000	100	41.833	11,95	100	325.000	260	466.833	4,3	0,82	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan	6 PT	567.462	6 PT	100.000	18 PT	350.000	12	41.833	11,95	18 PT	325.000		466.833		0,82	
	Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Standar pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian	0	-	0	-	3 dokumen	100.000	0	-	0,00	0	100.000		100.000		0,00	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150.000	0	-	5 Dokumen	150.000	0	-	0,00	5 Dokumen	150.000		150.000		1,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	417.462	1 Laporan	100.000	3 Laporan	100.000	2	41.833	41,83	3 Laporan	75.000		216.833		0,52	

No	Urusan/Bidang Urusan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan kegiatan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th.2021						Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra) Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022			
							Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Target Renja PD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun		Tingkat Capaian Realisasi Target	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10=(5+7+9)		-11= 10/4	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan SDM dan Kelembagaan	2,6	973.794	2,6	400.000	3,0	4.250.227	3,0	695.342	3,0	16,36	3,0	3.800.000	8,6	4.895.342	3,3	5,03
	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga Penyuluh PerkebunanTerampil	20 Orang	400.000	20 Orang	-	28 Orang	200.000	-	-	-	0,00	28 Orang	500.000	-	500.000	-	1,25
	Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat.	20 Orang	400.000	0	-	8 orang	100.000	0	-	-	0,00	8 orang	250.000	-	250.000	-	0,63
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	0	-	0	-	20 Orang	100.000	0	-	-	0,00	30 orang	250.000	-	250.000	-	0,00
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan	1 Laporan	973.794	1 Laporan	400.000	4 kab/nota	2.601.427	-	421.402	-	16,20	4 kab/nota	1.250.000	-	2.071.402	-	2,13
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Laporan	823.794	1 Laporan	400.000	4 Dokumen	551.610	4	421.402	-	76,39	4 Dokumen	300.000	-	1.121.402	-	1,36
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompokkptani yang mendapat Penyuluhan dan	1 Poktan	150.000	0	-	5 Poktan	2.049.817	0	-	-	0,00	5 Poktan	950.000	-	950.000	-	6,33
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.	0	-	0	-	6 Poktan	1.448.800	-	273.940	-	18,91	8 Poktan	2.050.000	-	2.323.940	-	0,00
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooorposisi Petani	Jumlah Kooorposisi Petani yang dibentuk dan beroperasi	0	-	0	-	4 unit	1.023.800	3	273.940	-	26,76	4 Unit	1.500.000	-	1.773.940	-	0,00
	Pendampingan Manajemen Kooorposisi Petani.	Jumlah pendampingan Manajemen Kooorposisi Petani.	0	-	0	-	2 Laporan	425.000	0	-	-	0,00	3 Laporan	550.000	-	550.000	-	0,00

Sumber : Data LKj-IP 2024, dan Renstra Dinas Perkebunan Th2021-2026, Th. 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Untuk Non urusan Pemerintahan bidang Pertanian, bahwa ;

Program penunjang urusan Pemerintahan daerah, dengan indikator kinerja berupa capaian Nilai Sakip bahwa sampai dengan tahun 2022 realisasi capaian program/kegiatan sebesar 194,8 atau rata-rata capaian Nilai Sakip sebesar 64,93, dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.56,08 Milyar. Capaian realisasi target kinerja program ini mengalami peningkatan sebesar 3,25 persen dan keuangan sebesar 2,59 persen.

b. Untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian, bahwa ;

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian, realisasi capaian program/kegiatan s/d tahun 2022 sebesar 41,5 persen dari target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp.22,97 Milyar, sedangkan tingkat capaian realisasi target program sebesar 4,15 persen dan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 20,99 persen.

2. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian, realisasi capaian program/kegiatan s/d tahun 2022 sebesar 23,0 persen dari target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp.11,96 Milyar, sedangkan tingkat capaian realisasi target program sebesar 4,6 persen dan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 1,14 persen.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, realisasi capaian program/kegiatan s/d tahun 2022 sebesar 55,0 persen dari target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp.4,77 Milyar, sedangkan tingkat capaian realisasi target program sebesar 3,7 persen dan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 5,93 persen.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian, realisasi capaian program/kegiatan s/d tahun 2022 sebesar 260 persen atau rata-rata sebesar 86,67 persen dari target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp.466,83 juta, sedangkan tingkat capaian realisasi target program sebesar 4,3 persen dan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 0,8 persen.
5. Program Penyuluhan Pertanian, realisasi capaian program/kegiatan s/d tahun 2022 sebesar 8,6 persen dari target kinerja yang ditetapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp.4,89 Milyar, sedangkan tingkat capaian realisasi target program sebesar 3,3 persen dan tingkat capaian serapan anggaran sebesar 5,03 persen.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang meliputi :

1. Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya lainnya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya;

Selain itu juga, penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024, juga memperhatikan hal – hal lain seperti :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
3. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sampai dengan kondisi triwulan.I. tahun 2024 masih dalam tahap persiapan administratif dan belum ada pencairan dana. Pada triwulan I tahun 2024 semua bidang masih melakukan penginputan data aliran Kas anggaran kegiatan, data Penyesuaian kembali data Perjanjian Kinerja, dan persiapan penetapan CP/CL maupun proses pengadaan Barang/Jasa di ULP.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja pelayanan dinas Perkebunan sampai dengan tahun 2024, secara terinci dapat dijelaskan pada tabel.2 berikut ini.

Tabel.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan s/d Tahun 2024 (Form T-C.30- Permendagri 86/2017).

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Perkebunan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Presentase peningkatan Nilai Sakip dan IKM	Sakip = 70,00 IKM = 85,5		67 / 83	69 / 85	71 / 87	73 / 88	67,74 / 83,69	70 / 84,64	5,40	5,8	
2	Presentase peningkatan produktifitas perkebunan	5,00%		4,22	4,82	5,04	5,28	4,80	4,87	5,40	5,8	
3	Presentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	30%		16,74	25,74	29,24	32,34	21,00	26,00	32,00	34,0	
4	Peningkatan Nilai NTUP-Perkebunan	110		120,69	122,76	125,04	127,25	137,56	142,29	144,5	147,5	
5	Peningkatan Produksi komoditi unggulan daerah	(Ton/Th)										
	-Kelapa Sawit	1.650.000		1.920.324	1.950.054	2.000.004	2.030.531	3.981.644	2.198.834	2.638.601	3.166.321	
	-Karet	600.000		364.906	369.277	327.638	331.563	377.161	364.004	436.805	524.166	
	-Kopi	120.000		116.475	118.003	110.043	111.486	115.658	115.423	138.508	166.209	
	-Kelapa Dalam	20.000		16.511	17.573	25.346	26.976	18.787	19.197	23.036	27.644	
	-Pinang	15.000		14.165	14.341	14.519	14.699	13.991	28.480	34.176	41.011	
	-Coklat	1.200		867,3	908,6	949,9	991,2	925	937	1.124	1.349	
	-Kayu Manis	30.000		53.422	53.679	53.937	54.196	45.768	30.200	36.240	43.488	

Berdasarkan tabel.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dari tahun 2021 s/d 2024 sebagai berikut ;

1. Untuk indicator persentase peningkatan Nilai Sakip dan IKM belum tercapai secara maksimal karena angka capaian masih dibawah angka SPM atau Standar Nasional, namun bila dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun sebelumnya maka capaian kinerja untuk tahun 2021 dan 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,20 %.
2. Untuk indicator persentase peningkatan produktivitas perkebunan, cukup baik capaian kinerjanya karena bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 7,3 %, namun secara nasional masih belum optimal capaian kinerjanya.
3. Untuk indicator persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT perkebunan, capaian kinerjanya juga cukup baik karena bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 4,2 %, namun secara nasional masih belum optimal.
4. Untuk indicator peningkatan nilai NTUP-perkebunan, capaian kinerjanya sangat baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan sebesar 27,56 – 42,25 %, dan secara nasional cukup optimal.
5. Untuk indicator peningkatan produksi komoditi unggulan daerah, secara umum capaian kinerjanya juga cukup baik, karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya Capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2024 kondisi triwulan I dapat dijelaskan bahwa ; Sampai dengan kondisi triwulan I TA.2024, capaian kinerja kegiatan pada dinas Perkebunan Provinsi Jambi baru mencapai 12,9 %, dengan realisasi fisik baru sebesar 30,00 %. Masih rendahnya angka capaian kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ;

1. Pada bulan April 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2024 masih harus diverifikasi dan disetujui oleh Mendagri.RI, dan setelah itu selanjutnya dibahas kembali untuk disepakati bersama dengan Tim Panggar DPRD Provinsi Jambi.
2. Penginputan data DPA-OPD TA.2024 melalui aplikasi SIPD sering terjadi kesalahan penginputan belanja barang/jasa (khusus barang yang diserahkan kepada masyarakat) masuk ke dalam belanja Modal dan adanya perbedaan harga satuan barang di aplikasi SSH dan Simda, dan ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan secara khusus.
3. Pelaksanaan kegiatan secara teknis baru pada tahap mempersiapkan Administrasi berupa pemantapan Juklak, Juknis kegiatan serta proses Lelang/pengadaan barang/jasa di ULP.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 ini dilakukan secara berjenjang mulai dari proses verifikasi oleh Bappeda, pembahasan Forum Perangkat Daerah sampai tahapan Musrenbang Provinsi untuk merumuskan RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 yang berpedoman terhadap RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Pergub Jambi No. 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dokumen RPJMD mencakup tahapan kelima Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yang memprioritaskan pada ; terbangunnya Struktur kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah, Peningkatan kualitas Kelembagaan Pemerintah, dan Penguatan sektor industri.

Terkait dengan **tujuan dari pada Misi ke-2 didalam RPJMD**, yakni **meningkatkan daya saing subsektor Perkebunan**, maka sasaran yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi yakni ;

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
 2. Meningkatnya Nilai Tambah hasil pengolahan produk tanaman perkebunan.
- Melalui pengembangan komoditi unggulan potensial daerah merupakan misi yang diemban oleh Sektor Pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor Perkebunan. Perwujudan dari misi ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang didukung melalui kebijakan pembangunan daerah dalam menyelesaikan beberapa isu pokok pembangunan.

Isu-isu pokok pembangunan perkebunan di provinsi Jambi, meliputi 2 (dua) faktor utama, yakni; faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun faktor-faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh meliputi :

1. Faktor Internal

❖ Kekuatan (*strenghts*) :

Beberapa faktor internal yang merupakan kekuatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah :

1. Tersedianya Sistem sarana dan prasarana.
2. Tersedianya Sumber daya Manusia yang cukup memadai.
3. Tersedianya Laboratorium benih, OPT, dan APH, serta Lahan kebun dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
4. Tersedianya Regulasi tentang Perkebunan berupa Peraturan, Norma, Standar Operasional, dan Perda Provinsi Jambi No.19 tahun 2020 tentang Tata Niaga Perkebunan Provinsi Jambi;

❖ Kelemahan (*weakness*) :

1. Belum akuratnya data terkait Pemetaan Infrastruktur dan Sarana prasarana serta Tingkat Produksi dan Pengembangan Komoditi Perkebunan;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan mutu benih, serta Peredaran benih dan pupuk di lokasi kebun masyarakat;

3. Belum optimalnya penanganan Pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
4. Belum terjangkaunya pelayanan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta Kebakaran lahan perkebunan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut

❖ Peluang (*opportunities*):

1. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri terhadap produk tanaman perkebunan;
2. Adanya Kebijakan Nasional tentang program Grasida, Gratieks, Food Estate, Mitigasi, dan antisipasi perubahan iklim;
3. Adanya potensi Kearifan lokal terkait komoditi unggulan daerah Jambi (Kelapa sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, Kakao, Kayu Manis dan Tembakau) serta Lahan yang Potensial;
4. Tersedianya Teknologi pengolahan dan Sarana pendukung serta industri pengolahan hasil perkebunan;

❖ Tantangan (*threats*):

1. Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan masih dibawah potensi teknis;
2. SDM pelaku usaha perkebunan dan Kelembagaan masih rendah;
3. Akses petani terhadap permodalan dan Sarana prasarana produksi serta pemasaran masih terbatas;
4. Isu lingkungan hidup (kesuburan tanah), globalisasi dan anomaly iklim serta penerapan teknologi masih terbatas.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor Internal dan Eksternal tersebut, maka Kebijakan pembangunan daerah yang ditempuh dan di tuangkan dalam **Agenda Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**, yaitu :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas tanaman Karet, Sawit, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang, dan Kulit Kayu Manis, melalui ;
 - a. Menyediakan benih unggul tanaman Karet, Kelapa sawit, Kelapa Dalam, Kopi, Pinang dan Kulit Kayu Manis untuk pengembangan yang bersifat bantuan dan subsidi.
 - b. Menyediakan pupuk dan pestisida untuk komoditi karet, kelapa sawit, kopi, kelapa dalam, pinang dan kulit kayu manis.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, pinang dan kulit kayu manis serta petugas lapangan.
2. Meningkatkan Penggunaan benih unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana Input.
3. Meningkatkan Kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.
4. Meningkatkan Kualitas SDM aparat dan masyarakat perkebunan melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan sistim kebersamaan Ekonomi.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2024 tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas Perkebunan tahun 2021-2026 dan dokumen RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2025. Adapun Review terhadap RKPD dengan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel. 3. Review terhadap Rancangan awal RKPD dengan Renja Perubahan dan Anggaran Tahun 2024.(Tabel.T-C.31.Permendagri 86/2017);

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
DINAS PERKEBUNAN											
3	27					NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai SAKIP		73,00 (BB)	16.487.797.790	
3	27	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		7 Dokumen	611.516.280	APBD
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbun Prov.	6 Dokumen	303.590.000	APBD
					07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Disbun Prov.	3 Laporan	307.926.280	APBD
3	27	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Akuntansi dan Keuangan	Disbun Prov.	3 Laporan	14.336.755.932	APBD
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji/Tunjangan	Disbun Prov.	89 Org/14 Bln	13.911.595.932	APBD
					02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disbun Prov.	2 Dokumen	304.440.000	APBD
					04	Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Disbun Prov.	3 Dokumen	120.720.000	APBD
3	27	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset Barang Milik Daerah		0	-	
3	27	01	1.04			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	Disbun Prov.	1 Laporan	16.500.000	APBD
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat berdasarkan Tupoksi	Disbun Prov.	12 Orang	16.500.000	APBD
3	27	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	Disbun Prov.	5 Laporan	621.031.889	APBD
					01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disbun Prov.	6 Paket	41.164.920	APBD
					02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Disbun Prov.	28 Paket	132.879.636	APBD
					03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga.	Disbun Prov.	12 Paket	84.000.000	APBD
					06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Disbun Prov.	2 Paket	11.000.000	APBD
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disbun Prov.	3 Laporan	351.987.333	APBD

1				2	3	4	5	6	7
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disbun Prov.	1 Jenis	41.426.393	APBD
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Disbun Prov.	6 Paket	41.426.393	APBD
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat dan Jasa Komunikasi SDA, dan Listrik	Disbun Prov.	2 Laporan	421.196.896	APBD
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Disbun Prov.	1 Laporan	29.996.896	APBD
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disbun Prov.	1 Laporan	391.200.000	APBD
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disbun Prov.	61 Unit	439.370.400	APBD
			01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disbun Prov.	61 Unit	439.370.400	APBD

				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				22.993.589.270	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.	Provinsi Jambi	15,0 Persen	7.699.340.490	
3	27	02	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Sarana Pertanian/Perkebunan		11 kab/kota	153.050.000	APBD
			01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	11 Laporan	71.000.000	APBD
			02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Kab/kota	3 Dokumen	82.050.000	APBD
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Unggulan Perkebunan bersertifikat Komoditi Lokal	Kab/kota	6 Komoditi	7.418.095.208	APBD
			01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Kab/kota	425 Sertifikat	294.320.000	APBD
			04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab/kota	14 Laporan	7.123.775.208	APBD
3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola	Kab/kota	4 Kab/kota	128.195.282	APBD
3	27	02	1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Kab/kota	4 Laporan	128.195.282	APBD

1					2	3	4	5	6	7
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota	Kab/kota	9,0 Persen	581.591.900	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	Kab/kota	2 Kegiatan	581.591.900	APBD
				01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas Pertanian/perkebunan.	Kab/kota	1 Dokumen	70.091.900	APBD
				09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab/kota	1 Laporan	511.500.000	APBD
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Kasus Bencana Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	31,0 Persen	3.577.119.420	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kab/kota	9 Kab/Kota	3.577.119.420	APBD
				01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	Kab/kota	150 Ha	385.166.920	APBD
				02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani. (termasuk Keg.BiOCF)	Kab/kota	50 Ha	66.900.000	APBD
				03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk BiOCF).	Kab/kota	400 Ha	3.125.052.500	APBD
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan Perusahaan Perkebunan	Kab/kota	100,0 Persen	2.137.854.100	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku	Kab/kota	6 PT	2.137.854.100	APBD
				02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas kabupaten/Kota	Kab/kota	5 Dokumen	137.854.100	APBD
				03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab/kota	3 Laporan	2.000.000.000	APBD

1				2	3	4	5	6	7
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM Petugas Penyuluh Perkebunan dan SDM Pekebun.	Kab/kota	5,5 Persen	8.997.683.360	
	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	4 kab/kota	6.997.683.360,00	APBD
				01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab/kota	4 Dokumen	75.000.000	APBD
				02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok yang mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan.	Kab/kota	5 Poktan	6.922.683.360	APBD
	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.	Kab/kota	6 Poktan	2.000.000.000	APBD
				01 Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Kab/kota	6 Unit	500.000.000	APBD
				02 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	Kab/kota	3 Laporan	1.500.000.000	APBD
JUMLAH								39.481.387.060,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Total perubahan usulan kegiatan pembangunan perkebunan untuk tahun 2024 melalui dana APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp. 39.481.387.060,00,-** yang meliputi 6 Program, terdiri dari ; Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.

Usulan program dan kegiatan pembangunan perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 dibahas pada Pertemuan Forum Lintas OPD Kabupaten/Kota atau Rapat Koordinasi Teknis Perkebunan (Rakortekbun) pada tanggal 15 s/d 17 Pebruari 2023 di hotel Sang Ratu, hasil pertemuan Forum Lintas OPD tersebut direkap oleh dinas Perkebunan Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dibahas pada acara Musrenbang Perkebunan Tingkat Provinsi Jambi pada bulan April 2023, kemudian dibahas kembali pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah se Provinsi Jambi dan Musrenbang Provinsi Jambi pada tanggal 28 Maret s/d 5 April 2023.

Hasil Notulen pertemuan Forum Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Isu strategis pembangunan perkebunan provinsi Jambi diantaranya ;
 - a. Belum optimalnya capaian kinerja produksi dan produktivitas tanaman.
 - b. Belum konsistennya penerapan Good Agriculture Practice (GAP) dan Good Handling Practice (GHP) oleh petani.
 - c. Mutu dan Harga Karet di tingkat petani yang masih rendah.
 - d. Masih tingginya luasan tanaman tua (TT) dan tanaman rusak (TR).
 - e. Belum Konsistennya kualitas mutu produk komoditi ekspor.
 - f. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas petani.
2. Usulan Program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai melalui dana APBN 2024 difokuskan pada komoditi Karet, Kelapa, Kopi, Pinang, Kayu Manis dan Kelapa sawit dalam kerangka pendanaan BDPDKS, diharapkan usulan CPCL-nya telah dilengkapi dengan titik koordinat Poligone.
3. Usulan Program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi tahun 2024 difokuskan pada komoditi ; Kopi, Kelapa Dalam, Pinang, Coklat dan Kayu Manis serta kegiatan lainnya seperti ; peningkatan Saprasi perkebunan, PLTB, pengelolaan standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan, sarana UPPB, intensifikasi kopi, karet, bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perkebunan, bantuan Saprasi pasca panen, pengembangan dan penyuluhan Pasca panen, pengendalian OPT, Brigadir Karhutlahbun, ISPO, Masterplan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat/penurunan pengangguran ekstrim, penyuluhan

dan pemberdayaan petani, perlindungan perkebunan pembinaan, pengamatan dan pengendalian OPT, Bimtek perbanyakan dan aplikasi agen hayati, pengembangan dan pengawasan mutu benih, rintisan sertifikasi ISPO swadaya, dan penerbitan STD-B petani swadaya.

4. Program dan kegiatan PSR, penyediaan dan peningkatan Saprasi perkebunan sawit, sumber daya manusia untuk pengembangan lebih luas dilaksanakan melalui pendanaan BPDPKS.
5. Untuk penyediaan logistic benih, maka kabupaten/kota dapat mengajukan usulan kegiatan Desa Mandiri Benih melalui sumber dana APBN. Sedangkan untuk pembangunan Kebun induk diharapkan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten/kota berupa penyediaan Lahan.
6. Semua Usulan program dan kegiatan diatas harus didukung dengan ;
 - a. Untuk dana APBD Provinsi Jambi dilengkapi dengan Proposal dan CPCL beserta titik koordinatnya.
 - b. Untuk dana APBN, dan lainnya dilengkapi dengan Proposal dan CPCL beserta titik koordinat Poligonnya, dan diupload melalui aplikasi e-proposal.

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel.4. berikut ini ;

**Tabel.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
(T-C.32. Permendagri 86 / 2017)**

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024									
FORM. T-C.32 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017									
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI									
NO	PROGRAM/ KEGIATAN			LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		CATATAN	
I	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.				
	1.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan				
		01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Merangin, Batanghari, Sarolangun, , Muaro Jambi, Tanjung Jabung, Bungo	Jumlah Sebaran Peredaran Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	8 Kabupaten	2 Semester	kegiatan Monitoring dan koordinasi	
	2.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat				
		01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kebun UPTD Sei Tiga, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Kerinci	Jumlah Sertifikat Benih	15 Penangkar	425 batang	Kelapa Sawit, Kopi, Kayu Manis, dan Pinang	
		02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Tebo, Bungo, Batanghari, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kerinci, Muaro Jbi, Tanjabbar, Tanjabtim, .	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	4 desa, 4 desa, 2 desa, 6 desa, 9 desa, 12 desa, 3 desa, 6 desa + 3 desa, 3 Poktan.	120.0000 batang Kelapa Sawit; 45.0000 Kayu Manis; 300.000 batang Pinang	Komoditi Karet, Kopi, Pinang, bibit Kayu Manis, bibit Kopi, bibit Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kayu Manis, bibit Pinang + bibit Sawit, dan Kelapa Genjah, bibit Pinang, Bibit	
	3.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi			Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola				
		01	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro organisme		Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang dinilai				
		02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Bungo, Batanghari, Tanjab Barat,	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	1 Kec, 2 desa,	4 Poktan, 100 Ha,	Bimtek Hama Kelapa Sawit, Bintek Agens hayati tanaman Karet, Pestisida Nabati, Penyakit Kopi, Penyakit Karet, Penyakit Kelapa Dalam,	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		CATATAN
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota			
	1.	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata			
		01. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tebo, Bungo, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Kota Sei Penuh, Tanjab Barat, Tanjab Timur, Muaro Jambi.	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas Pertanian/perkebunan.	9 Kab/Kota	1 Dokumen	Identifikasi Penerapan Peta Presisi Tegakan Kelapa Sawit rakyat
		02. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	Tebo, Bungo, Batanghari, Sarolangun, Merangin, Kota Sei Penuh, Tanjab Barat, Tanjab Timur.	Jumlah pengendalian, pemanfaatan prasarana kawasan, dan komoditas pertanian.	1 Poktan, 2 desa, 2 Poktan, 1 desa, 3 desa, 2 desa, 5 desa, 4 desa.	1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 2 Poktan + 1 Gapoktan, 3 Poktan,	UPH-Karet, UPPB, Alat mesin Kopi, Mesin Kopi kering, Solar drayer, Mesin Pengolahan Kopi, Lantai Jemur Pinang, Alat Pasca panen Pinang.
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			Persentase Luas areal Pengendalian OPT perkebunan dan penanganan Bencana pertanian			
	1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
		01. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tebo, Bungo, Batanghari, Tanjab Barat,	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	2 desa, 4 desa, 6 Kec, 6 desa,	2 paket, 5 desa, 10 desa/200 org,	Pelatihan, Bimtek hama Kumbang Sawit, Pengendalian OPT Karet, OPT Sawit 200 org, OPT Kelapa Dalam,
		02. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Batang Hari, Sarolangun, Muaro Jbi, Tanjab Barat,	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani.	1 desa, 7 desa,	130 Ha, 100Ha,	Bibit Sawit dan Pinang, bibit Pinang,
		03. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Tebo, Bungo, Batanghari, Merangin, Muaro Jbi, Tanjab Barat,	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	2 paket, 3 Kec, 1 desa, 1 desa,	25 Ha, 15 Org, 7desa/250 Ha, 1 Poktan, 25 Ha,	Pelatihan, Demplot PLTB, Sarana prasarana Karhutlah, PLTB, demplot PLTB. PLTB,

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME		CATATAN
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			Persentase Peningkatan Kelengkapan dokumen Perizinan			
	1.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku			
		01. Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian		Standar pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian			
		02. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas kabupaten/Kota			
		03. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Batang Hari, Muaro Jbi,	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 desa, 4 desa, 6 Kec, 4 desa,	750 persil, 1000 persil,	Penerbitan STD-B (DBH Sawit dan BioCF).
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Persentase ketersediaan SDM dan Kelembagaan yang mapan.			
	1.	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian		Jumlah tenaga Penyuluh Perkebunan Terampil			
		01. Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		Jumlah Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat.			
		02. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi			
	2.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan		Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan			
		01. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tanjab Barat, Tanjab Timur,	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 desa, 4 desa,	75 orang, 150 orang,	Pelatihan GMP dan Pasca Panen
		02. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Tebo, Bungo	Jumlah Kelompok tani yang mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan.	Kabupaten,	200 org,	Pelatihan Brigadir Karhutlah dan KTPA,
	3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.			
		01. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	2 desa, 4 desa,	75 orang, 150 orang,	Rintisan Sertifikasi ISPO Swadaya
		02. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	Batang hari,	Jumlah pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	2 desa,	2 Dokumen	Registrasi UPPB

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Strategi pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang dirumuskan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2019-2024 yaitu *peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan*. Sasaran strategis Dirjen Perkebunan untuk periode 2019-2024 yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan, yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Kopi, Teh, Lada, Cengkeh, Pala, Jambu Mete, Nilam, Kapas, Tembakau, Kemiri sunan, dan Sagu.

Selanjutnya, untuk peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan beroreintasi ekspor dalam mewujudkan daya saing subsektor perkebunan, maka aspek-aspek kebijakan Ditjen Perkebunan tahun 2019-2024, adalah ;

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan yang selama ini berkontribusi dalam penerimaan negara dan ekspor seperti kelapa sawit (CPO dan minyak sawit lainnya), karet, kelapa, tebu, kopi dan kakao.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui aspek penguatan perbenihan, pemberdayaan dan pendekatan SPM.
3. Pengembangan komoditas perkebunan yang berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat aspek kelembagaan petani/pekebun.
5. Pengembangan pasar dengan pendekatan kerjasama diforum forum internasional.
6. Upaya pengembangan inovasi dan adopsi teknologi.
7. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur dalam mendukung sistem budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
8. Perbaikan tata niaga untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul.
9. Sinergisitas kebijakan pusat (antar K/L)-daerah dalam penganggaran dan dukungan regulasi yang kuat terkait ekspor impor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan diwujudkan dalam setiap tahun pada kurun waktu lima tahun. Disamping itu perumusan tujuan strategis memungkinkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Jangka Menengah yang dirumuskan didalam Renstra dinas perkebunan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dan nilai tukar petani dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan negara.
2. Meningkatkan mutu hasil pengolahan komoditi perkebunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi dan manajemen kelembagaan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan aspek operasional yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sasaran Jangka Menengah yang ditetapkan didalam Renstra dinas perkebunan, meliputi ;

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan.
2. Peningkatan Nilai Tambah hasil pengolahan produk tanaman perkebunan.
3. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021 - 2026 di implementasikan dalam program dan kegiatan setiap tahun. Untuk tahun 2024 yang merupakan tahun ke empat pelaksanaan RENSTRA ini, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melaksanakan 8 kegiatan urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan sasaran terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel; dan 8 kegiatan urusan Pertanian untuk mewujudkan Sasaran strategis meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan pendapatan petani melalui 5 Program teknis.

Selanjutnya rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk tahun 2024, dapat dilihat pada tabel.5. (T-C.33 Permendagri 86/2017) berikut ini ;

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025											
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI											

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset Barang Milik Daerah		0	-				
									APBD		3 Laporan	34.650.000
									APBD		1 Laporan	-
3	27	01	1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Kepegawaian	Disbun Prov.	1 Laporan	16.500.000	APBD		1 Laporan	17.325.000
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat berdasarkan Tupoksi	Disbun Prov.	12 Orang	16.500.000	APBD		3 Laporan	17.325.000
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	Disbun Prov.	5 Laporan	621.031.889	APBD		7 Laporan	652.083.483
			01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disbun Prov.	6 Paket	41.164.920	APBD		6 Paket	43.223.166
			02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Disbun Prov.	28 Paket	132.879.636	APBD		48 Paket	139.523.618
			03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga.	Disbun Prov.	12 Paket	84.000.000	APBD		24 Paket	88.200.000
			06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Disbun Prov.	2 Paket	11.000.000	APBD		2 Paket	11.550.000
			09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disbun Prov.	3 Laporan	351.987.333	APBD		12 Laporan	369.586.700
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disbun Prov.	5 Jenis	441.667.900	APBD		5 Jenis	463.751.295
			01	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Disbun Prov.	0	-	APBD		0	-
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Disbun Prov.	6 Jenis	189.637.900	APBD		6 Jenis	199.119.795
			06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Disbun Prov.	20 Unit	252.030.000	APBD		20 Unit	264.631.500

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disbun Prov.	1 Jenis	41.426.393	APBD		4 Jenis	485.754.453
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Disbun Prov.	6 Paket	41.426.393	APBD		1 Laporan	43.497.713
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat dan Jasa Komunikasi SDA, dan Listrik	Disbun Prov.	2 Laporan	421.196.896	APBD		1 Laporan	442.256.741
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Disbun Prov.	1 Laporan	29.996.896				
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disbun Prov.	1 Laporan	391.200.000	APBD		96 Unit	922.677.840
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Disbun Prov.	61 Unit	439.370.400	APBD		61 Unit	461.338.920
			01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Disbun Prov.	61 Unit	439.370.400	APBD		27 unit	461.338.920
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				18.158.051.810				18.725.954.401
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai Peruntukan Kabupaten/ Kota.	Provinsi Jambi	15,5 Persen	7.699.340.490			15,5 Persen	8.084.307.515
3	27	02	1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sebaran Peredaran Sarana Pertanian/Perkebunan		11 kab/kota	153.050.000	APBD		11 kab/kota	160.702.500
			01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	11 Laporan	71.000.000	APBD		11 Laporan	74.550.000
			02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian	Kab/kota	3 Dokumen	82.050.000	APBD		3 dokumen	86.152.500
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Komoditi Unggulan Lokal Perkebunan bersertifikat	Kab/kota	6 Komoditi	7.418.095.208	APBD		6 Komoditi	7.788.999.968
			01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Kab/kota	425 Sertifikat	294.320.000	APBD		425 Sertifikat	309.036.000
			04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab/kota	14 Laporan	7.123.775.208	APBD		14 Laporan	7.479.963.968
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah SDG Tumbuhan, Mikro organisme yang dikelola	Kab/kota	4 Kab/kota	128.195.282	APBD		4 Kab/kota	134.605.046
3	27	02	1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Kab/kota	4 Laporan	128.195.282	APBD		1 VUB	134.605.046

3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang sesuai Peruntukan di Kab/Kota	Kab/kota	9,5 Persen	581.591.900			9,5 Persen	610.671.495
3	27	03	1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditata	Kab/kota	2 Kegiatan	581.591.900	APBD		4 Kegiatan	610.671.495
			01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas Pertanian/perkebunan.	Kab/kota	1 Dokumen	70.091.900	APBD		9 Dokumen	73.596.495
			09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab/kota	1 Laporan	511.500.000	APBD		25 Unit	537.075.000
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Kasus Bencana Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	31,0 Persen	3.577.119.420			32,0 Persen	3.755.975.391
3	27	05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Cakupan Wilayah Pengendalian dan Bencana Pertanian	Kab/kota	9 Kab/Kota	3.577.119.420	APBD			3.755.975.391
			01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan (Demplot)	Kab/kota	150 Ha	385.166.920	APBD		125 Ha	404.425.266
			02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani. (termasuk Keg.BioCF)	Kab/kota	50 Ha	66.900.000	APBD		100 Ha	70.245.000
			03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan (termasuk BioCF).	Kab/kota	400 Ha	3.125.052.500	APBD		250 Ha	3.281.305.125
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Kelengkapan Perizinan Perkebunan Peningkatan dokumen Perusahaan	Kab/kota	100,0 Persen	850.000.000			100,0 Persen	892.500.000
3	27	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Perkebunan Yang Memenuhi Standar Operasional/Ketentuan yang berlaku	Kab/kota	18 PT	850.000.000	APBD		18 PT	892.500.000
			01	Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	Standar pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian	Kab/kota	0	-	APBD		2 dokumen	-
			02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis izin usaha pertanian di Lintas kabupaten/Kota	Kab/kota	5 Dokumen	150.000.000	APBD		5 Dokumen	157.500.000
			03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab/kota	3 Laporan	700.000.000	APBD		3 Laporan	735.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan SDM Petugas Penyuluh Perkebunan dan SDM Pekebun.	Kab/kota	6,0 Persen	5.450.000.000			6,0 Persen	5.382.500.000
3	27	07	1.01	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	Jumlah tenaga Penyuluh Perkebunan Terampil	Kab/kota	38 Orang	900.000.000	APBD		38 Orang	800.000.000
			01	Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh pertanian yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Diklat	Kab/kota	12 orang	450.000.000	APBD		12 orang	472.500.000
3			02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Kab/kota	20 Orang	450.000.000	APBD		20 Orang	472.500.000
	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Wilayah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Kab/kota	4 kab/kota	1.650.000.000,00	APBD		4 kab/kota	1.732.500.000
			01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (termasuk keg. Penas 2024)	Kab/kota	4 Dokumen	400.000.000	APBD		4 Dokumen	420.000.000
			02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok tani yang mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (termasuk honor PPL).	Kab/kota	5 Poktan	1.250.000.000	APBD		5 Poktan	1.312.500.000
	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Mapan.	Kab/kota	6 Poktan	2.900.000.000	APBD		6 Poktan	2.850.000.000
			01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Kab/kota	6 unit	2.150.000.000	APBD		6 unit	2.257.500.000
			02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	Jumlah pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.	Kab/kota	2 Laporan	750.000.000	APBD		2 Laporan	787.500.000
JUMLAH								39.481.387.060,00				49.481.387.060,00

Tabel 6 . Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

RUMUSAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024				
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI				
NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 2). Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 3). Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD. 4). Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Perubahan. 5). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 6). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan. 7). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja-SKPD.
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN ; 2). Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN ; 3). Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD.
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	1. Pengamanan barang milik daerah ; 2). Penatausahaan barang milik daerah.
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya ; 2. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem informasi Kepegawaian ; 3. Diklat Pegawai ASN
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik, air, dan telepon ; 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; 3. Penyediaan peralatan rumah tangga ; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 5. Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi SKPD.
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan operasional lapangan ; 2. Pengadaan Meubel ; 3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat ; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
			8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan ; 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ; 3. Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Pengawasan sebaran Pupuk, pestisida, alsintan dan Sarana pendukung lainnya ; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran Sarana pertanian.
			2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih ; 2. Pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih/bibit perkebunan.
			3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme Kewenangan Provinsi	1. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro organisme ; 2. Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikro organisme.
		2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penataan Prasarana Pertanian	1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan ; 2. Pengendalian dan pemanfaatan Prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan ; 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan JUT ; 4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Jaringan irigasi ditingkat JUT ; 5. Pemb. dan pemeliharaan Laboratorium pertanian ; 6. Koordinasi, sinkronisasi, dan Penataan prasarana pendukung lainnya ; 7. Pemb. pemeliharaan rutin gedung UPTD berserta sarana pendukungnya.
		3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan; 2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; 3. Penanganan Dampak Perubahan iklim tanaman perkebunan ; 4. Penanggulangan Pasca bencana alam bidang perkebunan.
3	Meningkatnya Pendapatan petani.	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan; 2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; 3. Penanganan Dampak Perubahan iklim tanaman perkebunan ; 4. Penanggulangan Pasca bencana alam bidang perkebunan.
		2. Perizinan Usaha Pertanian	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Standar pelayanan publik pemberian IUP ; 2. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis IUP di Lintas Kab/Kota.; 3. Pembinaan dan Pengawasan penerapan IUP.
		2. Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	1. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian ; 2. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.
			2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi petani ; 2. Pendampingan Manajemen Korporasi petani.
			3. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan Kompetensi penyuluh pertanian ASN ; 2. Kerjasama pengembangan kompetensi Penyuluh pertanian Swadaya dan Swasta.

Adapun kegiatan prioritas unggulan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 untuk mencapai Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT, sebagai berikut :

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian ;
 - Pengawasan Sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian lainnya.
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian.
- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman ;
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan.
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat benih perkebunan.
- Pengelolaan Sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme Kewenangan Provinsi ;
 - Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme.
 - Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan mikro organisme.
- Petanaan Prasarana pertanian/perkebunan ;
 - Perencanaan, pengembangan Prasarana, kawasan dan komoditi Perkebunan.
 - Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan, dan komoditas perkebunan.
 - Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani (JUT).
 - Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi (TAM) di tingkat Usaha tani.
 - Koordinasi dan Sikronisasi penataan Prasarana pendukung pertanian lainnya.
 - Pembangunan dan rehabilitasi Laboratorium pertanian.
 - Pembangunan dan Pemeliharaan gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya.
- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi;
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
 - Penanganan Dampak Perubahan iklim tanaman perkebunan.
 - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun, Gangguan Usaha Tanaman (GUP) pangan, hortikultura, dan perkebunan.
 - Penanggulangan Pasca panen Bencana Alam bidang Perkebunan.
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian (IUP) yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota;

- Penyusunan Standar pelayanan public pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan IUP.
- Pembinaan dan pengawasan Penerapan IUP.(Penerbitan STD-B petani swadaya).
- Pengembangan Penerapan penyuluhan pertanian ;
 - Diseminasi informasi teknis, social ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.
- Pengembangan ketenagaan Penyuluh Pertanian ;
 - Pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian ASN.
 - Kerjasama pengembangan Kompetensi Penyuluh pertanian swadaya dan swasta.
- Pengembangan kapasitas Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan Korporasi petani.
 - Pendampingan Manajemen korporasi petani.

BAB. IV

PENUTUP

Pengembangan dan penumbuhan sistem usaha agribisnis berbasis Perkebunan pada hakekatnya dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, pengembangan diversifikasi hasil dan usaha, pemberdayaan SDM, penumbuhan kelembagaan dan kemitraan usaha, peningkatan sarana infra struktur pada sentra-sentra produksi yang bertumpu pada peningkatan peran masyarakat perkebunan dan masyarakat dunia usaha bidang perkebunan. Sementara Pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator, pendamping dan pencipta iklim usaha yang kondusif.

Renja Perubahan Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan pengukuran capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan Perkebunan tahun 2023 merupakan keberhasilan yang dapat dicapai pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2021 – 2026. Penilaian ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada awal tahun 2024 nanti.

Demikian Ran-Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2024 ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2024, yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja di tahun mendatang. Kiranya Rencana Kerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.